

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai kesimpulan yakni jawaban atas permasalahan inti dari penelitian ini serta pembuktian dari hipotesis penelitian.

1. Efisiensi pelayanan berpengaruh signifikan terhadap pelayanan pengurusan surat keterangan miskin berbasis aplikasi E-Pemutakhiran. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik efisiensi pelayanan aplikasi E-Pemutakhiran maka akan baik pula pelayanan pengurusan surat keterangan miskin. Nilai r^2 variabel efisiensi pelayanan sebesar 0,045 dari nilai R^2 sebesar 0,797 yang menjelaskan bahwa sebesar 4,5% variabel pelayanan publik dipengaruhi oleh variabel efisiensi pelayanan.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap pelayanan pengurusan surat keterangan miskin berbasis aplikasi E-Pemutakhiran. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas pelayanan aplikasi E-Pemutakhiran maka akan baik pula pelayanan pengurusan surat keterangan miskin. Nilai r^2 variabel efisiensi pelayanan sebesar 0,793 dari nilai R^2 sebesar 0,797 yang menjelaskan bahwa sebesar 79,3% variabel pelayanan publik dipengaruhi oleh variabel efisiensi pelayanan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tak lepas dari adanya keterbatasan, sehingga adapun keterbatasan dalam penelitian ini disampaikan sebagai berikut.

1. Poin-poin pertanyaan pada kuisioner yang peneliti sebar. Ada beberapa poin pertanyaan yang tidak valid saat penghitungan pada aplikasi SPSS, sehingga peneliti hanya menggunakan beberapa data dari poin-poin pertanyaan yang valid untuk diolah dalam penelitian ini.
2. Topik E-Pemutakhiran dalam penelitian ini tergolong baru, sehingga masih terbatas untuk instrumen penelitian yang digunakan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang dituju secara spesifik adalah masyarakat yang menikmati pelayanan pengurusan surat keterangan miskin atau pemohon surat keterangan miskin. Sebaiknya masyarakat juga lebih kritis dalam menikmati pelayanan pengurusan surat keterangan miskin. Jika ada penyelewengan, pungutan liar atau ada yang tidak sesuai dengan prosedur pelayanan publik, segera laporkan pada OMBUDSMAN. Perlu diberikan kesadaran kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan publik, bahwa pelayanan publik di satu pihak adalah hak masyarakat sebagai warga Negara, Pelayanan publik bukan berasal dari kemurahan hati pejabat, karena itu tidak perlu ada balas jasa untuk mendapatkannya, kesulitan mendapatkan pelayanan publik bukan suatu cobaan tuhan, tetapi karena kelalaian dan kesalahan penyelenggara pelayanan, dan memberikan hadiah kepada pelaksana pelayanan publik yang sudah dibiayai negara atau daerah adalah suatu kesalahan, tergolong sebagai perbuatan dzalim karena dapat mempersulit orang miskin lain yang tidak mampu memberikan hadiah seperti itu.

2. Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik

Penyelenggara pelayanan publik perlu memerhatikan aspek-aspek penting dalam melaksanakan efektivitas pemerintahan, yakni kompetitif, inovatif, dan partisipatif. Kompetitif ini terkait insentif kepada instansi yang berhasil menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik. Ada pula inovasi yang sifatnya baik sering kali dianggap berseberangan dengan sistem pemerintahan yang sedang berjalan. Pemerintah perlu memberikan aturan-aturan kepada aparaturnya agar inovasi bisa dilakukan selama tidak terjadi mal-administrasi terhadap pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik dalam melayani masyarakat khususnya pengurusan Surat Keterangan Miskin seharusnya

melakukan survei kepada pemohon Surat Keterangan Miskin (SKM) apakah pemohon memang benar-benar tidak mampu / miskin dalam beberapa aspek. Jenis-jenis kemiskinan dilihat dari keadaan dan penyebabnya menurut (Mardimin, 1996:24) yakni:

1. Kemiskinan absolut., Seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien,
2. Kemiskinan relatif., Kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu daerah,
3. Kemiskinan Struktural, Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah. Ketidaktepatan kebijakan pemerintah juga bisa menyebabkan kemiskinan struktural,
4. Kemiskinan Situsional atau kemiskinan natural, Kemiskinan Situsional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin.
5. Kemiskinan kultural, Kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya masyarakatnya yang sudah turun-temurun yang membuat mereka menjadi miskin.

Berikut adalah 14 kriteria miskin menurut standar BPS (Badan Pusat Statistik):

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dinyatakan miskin.